

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andi Suriyaman Mustari Pide, 2017. *Hukum Adat, Dahulu, Kini dan Akan datang.Kencana*: Jakarta.
- Boedi Harsono. 2008. *Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya)*. Djambatan: Jakarta
- Fa Bruggink, J.J.H. (2015). *Rechtreflecties* (dalam terjemahan Arief Sidharta: Refleksi Tentang Hukum). Bandung: Citra Aditya Bakti. Menyajikan gagasan tentang hukum yang reflektif terhadap nilai-nilai dan norma lokal, rida Patittingi. 2012. *Dimensi Hukum Pulau-Pulau Kecil di Indonesia, Rangkang Education*: Yogyakarta
- Hendrawati Hamid. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat. De la Macca*: Makassar
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum (Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel) Edisi Revisi*. Mirra Buana Media: Yogyakarta.
- John Rawls. 2019. *Teori Keadilan. dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahtraaan Sosial dalam Negara*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaja. 2014. *Hak-Hak Atas Tanah. Kencana*: Jakarta.
- Kismartini dan Burhan Bungin. 2019. *Wilayah Pesisir Indonesia: Narasi Kebijakan Publik masalah pesisir dan Pulau-pulau Kecil di Indonesia. Prenadamedia Grup*: Jakarta.
- Kusnu Goesniadhie. 2010. *Harmonisasi Sistem Hukum. (Mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik*. Nasa Media: Malang.
- La Sara. 2014. *Pengelolaan Wilayah Pesisir. Gagasan Pemelihara aset wilayah Pesisir dan Solusi pembangunan bangsa*. Alfabeta: Bandung.
- Laksanto Utomo. 2017. *Hukum Adat. Rajawali Pers*: Depok
- Musakkir. 2013. *Putusan Hakim yang diskriminatif dalam perkara Pidana suatu tinjauan sosiologi hukum dan Psikologi Hukum*, Rangkang Education: Yogyakarta

- Rohmini Dahuri dkk. 2008. *Pengelolaan Sumber daya wilayah pesisir secara terpadu*. Pradnya Paramita: Jakarta. hlm 23.
- Anggraeny. Isdian. and Isdiyana Kusuma Ayu. 2020. *Kepastian Hukum Atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi Atas Tidak Adanya Sinonisasi Regulasi Bidang Pertanahan Di Kota Batam*. Amerta Media: Banyumas.
- Amilin, Amilin, 2019 “*Pengaruh Hoaks Politik Dalam Era Post-Truth Terhadap Ketahanan Nasional Dan Dampaknya Pada Kelangsungan Pembangunan Nasional*.” *Jurnal Lemhannas RI* 7.
- Arianto, Tjahjo, Asih Retno Dewi, and Harvini Wulansari, 2016. “*Menata Tanah Kota Batam: Jalan Penyelesaian Penguasaan Tanah Kampung Tua*.” In *Jalan Penyelesaian Persoalan Agraria: Tanah Bekas Hak, Pengakuan Hukum Tanah Adat, Penataan Tanah Batam, Percepatan Pendaftaran Tanah, Dan Integrasi Tata Ruang (Hasil Penelitian Sistematis 2016)*. Sleman: STPN Press dan PPPM.
- Arianto, Tjahjo, Tanjung Nugroho, and Eko Budi Wahyono. 2015. “*Analisis Hukum Penguasaan Dan Pemanfaatan Tanah Oleh Masyarakat Di Atas Hak Pengelolaan Otorita Batam*.” In *Problem Agraria, Sistem Tenurial Adat, Dan Body of Knowledge Ilmu Agraria-Pertanahan (Hasil Penelitian Sistematis STPN 2015)*. Sleman: STPN Press dan PPPM,
- Assyifarizi, Alfi, and Indra Purwanto. 2023 “*Analisis Kewenangan Pengelolaan Dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah Di Pulau Rempang*.” *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3 no 5.
- Azkia, Ashfa. 2021, “*Penerapan Reflexive Law Dalam Upaya Menjamin Keterbukaan Informasi Di Lingkungan Pengadilan*.” *Lex Renaissance* 6.
- Barnasaputri, Ikhana Indah. 2021, “*Jalan Panjang Pengakuan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Melalui Peraturan Daerah: Beberapa Persoalan Yang Belum Selesai*.” *Notaire* 4, no. 1 <https://doi.org/10.20473/ntr.v4i1.22805>.
- Bayo, Relexi, Andy Usmina Wijaya, and Fikri Hadi. 2023, “*Pengakuan Masyarakat Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*.” *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra* 1, no. 1.
- Bonde, Adeleida J. 2014, “*Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Pesisir Terhadap Kegiatan Pertambangan Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*.” *Jurnal Hukum Unsrat II*, no. 1
- Halim, Lili. 2015., “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Masyarakat*

Hukum Adat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Pesisir Dan Laut.” Fakultas Hukum Universitas Pattimura, <https://fh.unpatti.ac.id/perindungan-hukum-terhadap-hak-hak-masyarakat-hukum-adat-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-di-wilayah-pesisir-dan-laut/>.

Husen Alting. 2010. *Dinamika Hukum Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*. Laksbang Pressindo: Jakarta.

Hamdani, Fitrah. 2020, “*Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Adat.*” *Jurnal Education and Development* 8, no. 3.

Larubun, Faliuw Samuel, Renny Heronia Nendissa, and Merlien Irene Matitaputty. 2023, “*Kewenangan Pengakuan Hak Pengelolaan Wilayah Laut Kepada Masyarakat Hukum Adat Oleh Pemerintah Daerah.*” *CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review* 1,no.2

Librayanto, Romi. 2012 “*Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/Puu-Vii/2009.*” *Amanna Gappa*, , 1.

Lego Karjokoa, Zaidah Nur Rosidahbl Gusti Ayu Ketut Rahmi Handayani. 2019, *Refleksi Paradigma Ilmu Pengetahuan Bagi Pembangunan Hukum Pengadaan Tanah*, *Jurnal Bestuur* Vol. 7, Issue.

Matuankotta, Jenny. 2010 “*K.‘Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Dalam Mempertahankan Sumber Daya Alam.*” *Jurnal Konstitusi* 2, no. 1.

Nugroho, Aristiono, Tjahjo Arianto, and Wahyuni Wahyuni. 2019. “*Permasalahan Penguasaan Tanah Perkampungan Tua Kota Batam.*” In *Prosiding Seminar Nasional Karakteristik Subjek, Objek, Permasalahan, Dan Solusi Tanah Ulayat / Adat Dalam Pembangunan Pertanahan*. Sleman: STPN Press dan PPPM,

Nurkholis Huda, “*Konflik Rempang dan Legitimasi Negara Hukum,*” *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 53, No. 1 (2023):

Nonet, Philippe & Selznick, Philip (2005). *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. Bandung: Nusa Media. Membahas transisi menuju hukum yang responsif dan reflektif terhadap realitas sosia

Pinto, Zulmiro. 2015. “*Kajian Perilaku Masyarakat Pesisir Yang Mengakibatkan Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus Di Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Kecamatan Srandakan, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY).*” *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan* 3, no. 3

Ritzer, G. (2000). *Sociological Theory* (5th ed.). New York, NY: McGraw-Hill

Education.

- Ridwanuddin, Parid. 2017. *"Temuan-Temuan Lapangan Dampak Pertambangan Nikel Di Pulau Wawonii Kabupaten Konawe Kepulauan."* Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Rusmini, Rusmini, and Yonani Yonani. 2020 *"Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Dalam Kawasan Tanah Masyarakat Hukum Adat."* *Jurnal Hukum Tri Pantang* 6, no. 1
- Purwadi, Hari, 2009. Reformasi Hukum Nasional : Problem dan Prospeknya, dalam Satya Arinanto dan Ninuk Triyanti, Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi. Jakarta:Radjawali Pres,
- Safiuddin, Sahrina. 2018 *"Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Menguasai Negara Di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai."* *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 1.
- Sembiring, Julius. 2018. *Dinamika Pengaturan Dan Permasalahan Tanah Ulayat*. Edited by Nanjar Tri Mukti. 1st ed. Yogyakarta: STPN Press,
- Setiawan, Adam. 2018. *"Perspektif Hukum Refleksif Terhadap Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjamin Hak-Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan."* *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no 1.
- Sharfinda, Nisriina Milla, Antikowati Antikowati, and Bhim Prakoso, 2023 *"Kepastian Hukum Hak Guna Usaha Di Atas Hak Pengelolaan."* *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 7, no. 2.
- Simarmata, Rikardo, and Bernadinus Steni. 2017. *Masyarakat Hukum Adat Sebagai Subjek Hukum, Mendudukan Kecakapan Hukum Masyarakat Hukum Adat Dalam Lapangan Hukum Privat Dan Publik*. Yogyakarta: Samdhana Institute,
- Soerodjo, Irawan. 2014 *.Hukum Pertanahan Hak Pengelolaan Atas Tanah (HPL) Eksistensi, Pengaturan, Dan Praktik*. Laksbang Mediatama.
- Sukananda, Satria. 2018, *"Pendekatan Teori Hukum Refleksif Dalam Menjawab Permasalahan Keterbatasan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Di Indonesia."* *Law and Justice* 3, no.1
- Sumarja, F X. *Hak Atas Tana*. 2015. *Bagi Orang Asing, Tinjauan Politik Hukum Dan Perlindungan Warga Negara Indonesia*. Vol. 1. Stpn Press.
- Supit, Eric Henry. 2021. *Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum."* *Lex Administratum* 9,

no.4

Sukirno. 2018. *Politik Hukum Pengakuan Hak Ulayat*. Jakarta: Prenamedia Group

Tenong, Sirjon, Mustating Daeng Maroa, and Rahmat Setiawan. 2021. *“Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun.” Jurnal Yustisiabel* 5, no. 2

Trijono, Rachmat, 2015. *Hak Menguasai Negara Di Bidang Pertanahan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2023. *Keadilan Timpang Di Pulau Rempang*. Jakarta: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia,

Z. Tamanaha, Brian, 1997. *Realistic Socio-Legal Theory Pragmatism and A Social Theory Of Law*. Oxford New York : University Press.

B. Jurnal

A.A. Putu Wiwik Sugiantari, S.H., M.H. *“AKTUALISASI HAK ASASI MANUSIA (HAM) DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN,”* no. 1 (2004): 1–14.

Adat, Warga, and Suladesi Utara. *“Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau Dari Konflik Warga Adat Toruakat Di Suladesi Utara”* 4 (2022): 185–95. <https://doi.org/10.47476/assyari.v4i3.1384>.

Alhakim, Abdurrahman, and Eko Soponyono. *“Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 3 (2019): 322–36. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i3.322-336>.

Anggoro, Teddy. *“KAJIAN HUKUM MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN HAM DALAM LINGKUP NEGARAKESATUAN REPUBLIK INDONESIA.” Jurnal Hukum & Pembangunan* 36, no. 4 (2017): 487. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol36.no4.1477>.

Asilah, Annisa Thurfah, and Heru Sugiyono. *“Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus/IUPK (Studi:IUPK Sebagai Kelanjutan Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan*

Batubara Dalam UU Minerba)." National Conference on Law Studies (NCOLS) 2, no. 1 (2020): 552–65.

Eriyanti, Fitri. "Pendidikan Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar: Aplikasi Teori Emile Durkheim Tentang Moralitas Dan Pendidikan Moral." *Demokrasi* 5, no. 2 (2006): 141–55.

Faisal, Faisal, and Derita Prapti Rahayu. "Tujuan Pemidanaan Undang-Undang Minerba Dalam Perspektif Kebijakan Kriminalisasi." *Bina Hukum Lingkungan* 5, no. 2 (2021): 287–303. <https://doi.org/10.24970/bhl.v5i2.189>.

Fransiskus Saverius Nurdin. "KEWAJIBAN NEGARA MENAKUI DAN MENGHORMATI MASYARAKAT HUKUM ADAT SEBAGAI ENTITAS DASAR PEMBENTUK PERADABAN BANGSA Fransiskus Saverius Nurdin." Universitas Kristen Wira Wacana, 2019, 1005–20.

Hanafi Pasaribu, Yusuf, and Dewi Robiyanti. "Didikan Positif Hukum Adat Tentang Membudayakan Sikap Berbagi Untuk Sesama Serta Memahami Indahnya Kebersamaan." *Journal Liaison Academia and Society (J-LAS)* 2022, no. 3 (2022): 18–33. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/J-LAS>.

Idrus, Nur Fadilah Al. "Dampak Politik Hukum Dan Respon Masyarakat Atas Pembaharuan Undang-Undang Minerba." *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan* 3, no. 2 (2022): 114–27. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i2.14898>.

Kholifah, Ayu. "Menakar Perlindungan HAM Dalam Revisi UU Minerba Melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2021): 26. <https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10610>.

Lelisari, Lelisari, Hamdi Hamdi, and Imawanto Imawanto. "Kemunduran Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam Sektor Pertambangan Mineral Dan Batubara." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 9, no. 2 (2021): 404–21. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.907>.

Muazzin, Muazzin. "Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 1, no. 2 (2014): 322–45. <https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a7>.

- Nadiyya, Ahsana. "Menakar Undang-Undang Mineral Dan Batubara Terhadap Kerentanan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 2, no. 3 (2021): 195–212. <https://jhlgr.rewangrencang.com/%0AMENAKAR>.
- Ndaumanu, Frichy. "Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Upaya Perlindungan Dan Penghormatan Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur." *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 37. <https://doi.org/10.30641/ham.2018.9.37-49>.
- Qurbani, Indah Dwi, and Ilham Dwi Rafiqi. "Bisnis Sektor Sumber Daya Alam Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Realitas Dan Tantangan." *Media Iuris* 5, no. 2 (2022): 259–84. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i2.34348>.
- Rajab, Adirandi M, Yoga Andriyan, and Sofyan Muhamad. "PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA PASCA PEMBERLAKUAN UU NO 3 TAHUN 2020" 2, no. 1 (2022): 32–46. Reno Fitriyanti.
- "Pertambangan Batubara Dampak Lingkungan, Sosial Dan Ekonomi." *Jurnal Redoks Teknik Kimia Volume 1*, no. Pertambangan Batubara : Dampak Lingkungan, Sosial dan Ekonomi (2016): 34–40